

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris dimana pertanian memberikan peranan penting pada perekonomian Nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani pada tahun 2018 berjumlah 38,70 juta jiwa yang memiliki luas lahan pertanian jagung sebanyak 7,1 juta hektare. Salah satu komoditas pertanian di Indonesia yang merupakan komoditas potensial adalah komoditas tanaman jagung. Jagung (*Zea mays L.*) merupakan salah satu bahan pangan yang penting di Indonesia karena jagung merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Menurut Kementerian Pertanian (2019) produksi jagung Indonesia tahun 2018 mencapai 30 juta ton per tahunnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2018 Kabupaten Lima puluh Kota adalah salah satu penghasil jagung terbanyak di Sumatera Barat. Kabupaten Lima puluh Kota mampu memproduksi tanaman jagung sebesar 40211 ton (lampiran 1). Salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi adalah Jagung (*Zea mays L.*). Kegunaan jagung bukan hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga bahan pakan dan bahan industri lainnya. Diperkirakan lebih dari 55% jagung dalam negeri digunakan untuk kebutuhan pakan 30% untuk konsumsi pangan selebihnya untuk kebutuhan industri lainnya dan bibit, hal ini menyebabkan kebutuhan akan jagung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya (Kasryno dkk., 2007).

Jagung termasuk komoditas unggulan di Sumatera Barat. Kebutuhan jagung di Sumatera Barat cukup besar yaitu sebesar 3,1 Juta Ton/tahun, karena permintaan untuk pakan terus meningkat sejalan dengan perkembangan subsektor peternakan terutama ayam. Kabupaten Lima puluh Kota sebagai salah satu sentra produksi jagung dimana juga sebagai sentra peternakan ayam petelur dan pedaging, hanya mampu menyuplai jagung 20% dari kebutuhan lokal. Kebutuhan lokal disuplai dari kabupaten lain terutama Pasaman Barat, Agam dan Kabupaten lainnya termasuk Tanah Datar. Secara total permintaan jagung Sumatera Barat belum mampu dipenuhi

sendiri, oleh karena itu suplai jagung dari daerah lain terutama provinsi tetangga sangat membantu kelangsungan peternakan unggas di Sumatera Barat (Hosen Nasrul,2014).

Dalam usaha tani jagung, peran pelayanan utama yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain mutlak diperlukan. Pelayanan yang dapat menunjang keberhasilan usaha seperti kemudahan untuk mendapatkan bantuan modal usaha, teknologi, dan penyuluhan. Peraturan pemerintah daerah/pusat yang mendukung kinerja usaha bisnis dari budi daya jagung tentu sangat diperlukan. Dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha tani jagung, pelayanan kelembagaan terhadap petani sangat diutamakan. Keberadaan penyuluh di lapangan sangat penting karena dapat diakses oleh petani dalam upaya mendapatkan informasi teknologi. Namun kenyataannya, penyuluh di lapangan sangat terbatas, bahkan seorang penyuluh harus melayani satu kecamatan. Sementara, lembaga finansial masih terbatas dalam memberikan pinjaman modal kepada petani. Hal tersebut juga merupakan permasalahan dalam pengembangan usaha tani jagung mulai dari sistem budidaya sampai pemasaran jagung (Aldillah Rizma, 2017).

Permasalahan yang diungkapkan oleh Deptan (2005), CAPSA (2006), Deptan (2007), Winarso (2012), Nikmah et al. (2013), dan Nadapdap (2016) (dikutip dari Aldillah Rizma, 2017) dapat disimpulkan di antaranya bahwa pendidikan petani yang rata-rata rendah merupakan faktor kelemahan dalam pengembangan wilayah, tingkat penguasaan teknologi petani jagung belum maksimal, dan keterbatasan modal sehingga petani menggunakan modal sendiri seadanya. Permasalahan dari aspek sumber daya lahan di antaranya lahan garapan umumnya sangat sempit, status lahan bukan milik, tata air/irigasi pada umumnya dalam kondisi yang kurang terpelihara, dan lahan kurang subur. Dari sisi kelembagaan, permasalahan di antaranya adalah kinerja kelompok tani jagung masih belum banyak berperan, banyak petani yang belum melakukan kemitraan dengan pihak lain, seperti dengan pengusaha jagung dan produk turunannya, dan masih sangat sedikit kelompok yang mampu mengakumulasi modal usahanya. Permasalahan selanjutnya dari aspek usaha/produksi, di antaranya: mahalnya harga pupuk dan obat-obatan, banyak petani tidak memiliki atau sulit

mendapat fasilitas Alsintan (seperti traktor dan corn sheller); dan kurang maksimalnya dalam penanganan budi daya, sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Serangan hama penyakit jagung masih sulit untuk dikendalikan terutama penyakit hawar daun dan hama lainnya, seperti ulat grayak; penanganan panen dan prosesing masih kurang mendapat perhatian dari petani, sehingga tingkat kehilangan hasil masih tinggi. Permasalahan dalam aspek penyuluhan adalah penyuluh lapangan belum memberikan penyuluhan yang berdasarkan kebutuhan petani di lapangan, seperti penyuluhan yang diberikan hanya sebatas bincang bincang di waruung antara penyuluh dengan petani jagung, selain itu saat ini para penyuluh di Kecamatan Guguk tidak terfokus pada budidaya jagung melainkan pada budidaya padi dan jahe.

Hal ini juga yang membuat peneliti ingin melihat kolaborasi multipihak sistem budidaya sampai pemasaran jagung yang ada di daerah ini, kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi suatu hal yang akan meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota. Kolaborasi yang ingin kita lihat adalah kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, pedagang, peternak, dan petani penghasil jagung. Kolaborasi Multipihak dianggap perlu sebagai suatu usaha dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi. Serta mampu bersinergi dengan dengan sektor ataupun organisasi lain agar tetap mengetahui potensi daerah, karena menyadari di setiap sektor tidak dapat diatasi hanya oleh diri sendiri. Untuk menciptakan kerjasama yang efektif tidaklah sederhana, tetapi memerlukan serangkaian proses yang harus dilakukan untuk meraih tujuan bersama (Ameli dan Kayes *dalam* Riyanto, 2010).

Salman (2012) membagi kolaborasi menjadi kolaborasi dua pihak dan kolaborasi multipihak (multi stakeholder) dimana dalam konteks pembangunan daerah, kolaborasi dua pihak adalah saling bekerja dan saling berkontribusi antara pemerintah dan komunitas dalam pencapaian visi daerah di satu sisi dan pemecahan masalah lokal spesifik komunitas di sisi lain. Adapun kolaborasi multipihak atau multi stakeholder adalah kolaborasi yang tidak hanya melibatkan komunitas dan pemerintah, tetapi melibatkan berbagai pihak yang lebih bervariasi dan interaksi yang berlangsung lebih baik. Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren,

mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama- sama untuk menggapai tujuan bersama. Ini merupakan sesuatu proses sosial yang sangat dasar. Umumnya, kerja sama melibatkan pembagian tugas, dimana tiap orang mengerjakan tiap pekerjaan yang ialah tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan penyuluhan pertanian

Penyuluhan pertanian menurut UU Nomor. 16/2006 merupakan proses pendidikan untuk pelaku utama dan pelaku usaha supaya mereka ingin serta sanggup membantu serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, serta sumber energi yang lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pemasukan, serta kesejahteraannya, dan tingkatan pemahaman dalam pelestarian guna lingkungan hidup. Dan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, telah dijelaskan bahwa ada tiga jenis penyuluh, diantaranya adalah penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya (petani sukses)

Menurut Slamet dalam Virra, Silviana Putri 2020 dalam pembuatan program penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan mengembangkan tenaga profesional di bidang penyuluhan pembangunan dan diwadahi oleh sistem kelembagaan penyuluh yang baik dan tenaga kerja yang kompeten di bidang penyuluhan

Sejalan dengan pemikiran Slamet (2003) tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai usaha, diantaranya telah dicanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) yang merupakan suatu upaya mendudukan, memerankan, memfungsikan, serta menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian dan kesatuan arah kebijakan. Salah satu tonggak pelaksanaannya yaitu dengan disahkannya Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) No.16 Tahun 2006.

Undang-undang ini merupakan suatu pijakan dalam pemberdayaan petani melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan para penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya (petani sukses). Pada

kebijakan ini dijelaskan bahwa penyuluh swasta dan penyuluh swadaya membantu penyuluh pemerintah dalam format kemitraan. Berdasarkan peranan ketiga penyuluh yang ada ditunjukkan bahwa peran penyuluh masih lemah, sementara integrasi, koordinasi dan bekerja antar penyuluh baik secara vertikal maupun horizontal juga tidak berjalan efektif, maka diperlukan suatu bentuk kerjasama yang tepat untuk menciptakan suatu kegiatan penyuluhan pertanian yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Kegiatan pembangunan pertanian akan lebih baik jika didukung oleh peranan penyuluh yang berarti. Oleh sebab itu, kegiatan penyuluhan merupakan potensi pembangunan baik dalam jumlah maupun mutu (Lidwina, 2017).

Berdasarkan pedoman pengembangan kawasan pertanian yang terdapat dalam Peraturan Menteri pertanian NO. 50 tahun 2012, untuk membangun dan mengembangkan kawasan pertanian di butuhkan kerjasama dan tanggung jawab multipihak. Pihak pihak yang terlibat dalam melaksanakan peran masing-masing disetiap rantai nilai pada usaha pertanian agar tujuan pengembangan kawasan dan peningkatan keuntungan dapat tercapai. Untuk menjalankan peran dalam menciptakan suatu kerjasama yang dibutuhkan adalah suatu interksi atau hubungan timbal balik yang mempengaruhi berbagai pihak yang terkait.

Oleh karena itu peneliti ingin melihat kolaborasi multipihak yang terjadi pada penyuluhan transformatif dalam komoditi jagung di Kabupaten Lima puluh Kota guna melihat perkembangan pengetahuan dan dinamikanya antar berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan penyuluhan. Konsep kolaborasi multipihak dinggap mampu menjadi basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan pertanian yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Kabupaten Lima puluh Kota yang menjadi lokasi penelitian bagi peneliti adalah salah satu tempat yang bisa digunakan dalam menguji kolaborasi multipihak ini karena Kabupaten Lima puluh Kota adalah salah satu penghasil jagung terbesar di Sumatera Barat. Kabupaten Lima puluh Kota juga memiliki instansi dinas pertanian, pengusaha jagung ,penyuluh pertanian, dan petani jagung yang akan memudahkan penelitian ini

B. Rumusan Masalah

Salah satu daerah sentra produksi jagung di Kabupaten Lima puluh Kota adalah Kecamatan Guguak yang mana memproduksi sebanyak 6550 ton jagung (Lampiran 2) dengan produktivitas 6,92 ton/ha luas tanam 1024 ha, dan luas panen 946 ha (Lampiran 3). Saat ini pemerintah sudah mulai membantu petani dengan adanya kostra tani dan program pemerintah yang akan membantu petani dalam meningkatkan pengetahuan dan pendapatan petani. Kolaborasi multipihak dalam penyuluhan dianggap mampu menjadi solusi dalam meningkatkan pengetahuan dan pendapatan petani mengenai komoditas jagung. Jika kita lihat dilapangan masih bnyak persoalan yang dihadapi oleh petani jagung seperti tata cara budidaya tanaman jagung yang diberikan oleh penyuluh kepada petani dianggap merugikan petani, kelembaban pada saat budidaya jagung, hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung, cuaca yang tidak stabil, masih minimnya inovasi dan nilai tambah, keterbatasan dalam mengakses pasar sehingga petani sulit dalam melakukan pemasaran terlebih jika terjadi panen raya yang menyebabkan harga jagung turun total di pasaran

Penyuluhan Transformatif adalah penyuluhan yang senantiasa mengalami perubahan transisi seperti perubahan organisasi, perencanaan strategi, re-organisasi, dan menetapkan prioritas baru (Amanah, Siti. 2007). Pada prinsipnya, penyuluhan adalah proses yang sistematis untuk membantu petani, nelayan, pembudidaya, maupun komunitas lain agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri (*help people to help themselves*), sehingga pendekatan penyuluhan seyogyanya memprioritaskan kebutuhan partisipan penyuluhan (Amanah, Siti. 2007). Penyuluhan pertanian yang transformatif memiliki peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan usaha tani jagung agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dimiliki oleh petani, dengan program kegiatan penyuluhan yang inovatif tentunya akan mampu meningkatkan produktifitas para petani, namun jika ditinjau kelpangan kegiatan penyuluhan yang dilakukan pemerintah masih saja terfokus pada aspek budidaya, yang seharusnya penyuluhan juga mempertimbangkan aspek pascapanen dan pemasaran dari jagung tersebut.

Berdasarkan penelitian Vintarno, Jufitra .dkk pada tahun 2019 mengatakan bahwa perkembangan penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan pertanian di Indonesia seharusnya sesuai dengan tujuan, sasaran, dan masalah yang ada dimana tujuan dan sasaran kebijakan penyuluhan pertanian mencakup pelaku utama dan pelaku usaha. Dan tujuan akhir pemerintah yaitu peningkatan pemberdayaan petani sehingga menjadi sejahtera dan meningkatkan produksi pertanian. Setiap target grup menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya. Selain itu adanya kesetaraan kepada seluruh petani di Indonesia. Dalam implementasi kebijakan penyuluhan pertanian, masih terdapat permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah.

1. Kualitas dan jumlah SDM penyuluh
Kualitas SDM penyuluh rendah menjadi salah satu permasalahan. Ketidamampuan penyuluh dalam menjalankan program dari pemerintah dan minimnya disiplin ilmu yang dimiliki menjadi kendala dalam penyuluhan. Selain itu, proses adaptasi penyuluh yang kurang baik dalam masyarakat akan menimbulkan gesekan sosial di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kurangnya jumlah penyuluh serta sebaran penyuluh yang tidak merata. Keberadaan suatu daerah yang terpencil, minimnya sarana dan prasarana serta jauh dari pusat kota menjadi salah satu alasan kurangnya jumlah penyuluh di suatu daerah tersebut. Idealnya 1 desa 1 penyuluh agar penyuluhan pertanian dapat berjalan baik. Dengan kondisi seperti ini pemerintah bisa berupaya menumbuhkembangkan penyuluh swadaya.
2. Sarana dan prasarana penyuluhan
Dengan keberadaan penyuluhan yang langsung bersentuhan dengan petani, tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Pada prakteknya, masih banyak penyuluh yang belum mendapatkan sarana dan prasarana tersebut. Kondisi ini akan berpengaruh pada kinerja penyuluh dalam menjalankan aktivitasnya.
3. Mobilisasi dan perpindahan penyuluh
Motivasi dan semangat penyuluh dalam melakukan berbagai aktivitas penyuluhan dapat menentukan keberhasilan petani ataupun kelompok tani. Tekanan dan masalah sosial lainnya mempengaruhi mobilisasi penyuluh. Kebijakan dilakukan dinas terkait dalam merotasi atau melakukan pemindahan PPL dari satu desa pindah ke desa yang lain akan

memberikan pengaruh sosial terhadap petani atau masyarakat. Adapula ketidaksesuaian penyuluh atau petani terhadap kondisi seperti ini.

Permasalahan dalam perkembangan kegiatan kerjasama penyuluhan juga dijelaskan dalam penelitian Virra Putri Silviana pada tahun 2020 tentang Kajian kerjasama dalam Penyuluhan Hortikultura (Bawang Merah) di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok penelitian ini menjelaskann bahwa masih terbatasnya kegiatan penyuluhan disepanjang aktifitas rantai nilai, penyuluh hanya melaksanakan kegiatan penyuluhan pada aspek pra produksi dan produksi saja. Sedangkan kegiatan pada rantai nilai yang lain seperti panen, pasca panen , dan pemasaran belum menjadi fokus utama dari kegitan penyuluhan. Jika dilihat dari kerja sama dengan penyuluh PNS, swasta, swadaya, kerja sama hanya terjadi saat menyusun metodologi penyuluhan sedangkan dalam menyelesaikan permasalahan petani di lapangan belum terjadi. Sedangkan kegiatan penyuluhan yang dibutuhkan adalah kegiatan penyuluhan yang memberikan solusi dari setiap permasalahan petani dari pra produksi hingga pemasaran. kerjasama multipihak dan penyuluhan transformatif disepanjang aktifitas rantai nilai sangat diperlukan dalam meningkatkan pertanian. Ketiga penyuluh, petani, pedagang dan pemerintah terkait harus melakukan kerjasama dalam memberikan dukungan dalam kegiatan penyuluhan disepanjang aktifitas rantai yang akan membantu petani dalam menstabilkan produksi dan harga. Untuk menciptakan suatu inovasi dalam kegiatan penyuluhan dibutuhkan kerjasama multipihak dengan memanfaatkan semua potensi dan informasi yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu caranya adalah dengan pemasaran berbasis platform digital yang akan membantu kegiatan penyuluh disepanjaang rantai nilai dan mensinergikan para penyuluh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator penyuluh BPP Kecamatan Guguk Kabupaten Lima puluh Kota kerjasama antar penyuluh, pedagang, dan peternak belum sepenuhnya terjadi, penyuluh PNS atau THL dan swadaya hanya membantu petani dalam mendorong peningkatan hasil produksi jagung setelah proses produksi selesai petani secara mandiri memasarkan hasil produksinya. Ini berbanding terbalik dengan penyuluh swasta yang tidak berperan dalam memberikan penyuluhan

di bidang produksi namun membantu sebagian petani jagung dalam memasarkan produksi jagung ke pihak lain. Jika dilihat dari kerja sama petani dengan pedagang dan peternak, terdapat kerjasama, tetapi tidak terdapat pembagian keuntungan yang adil. Kerja sama yang terjadi antara petani jagung dengan peternak dan pedagang hanya sekedar perjanjian untuk membeli jagung saat panen tanpa ada kesepakatan harga di atas kertas. Jika melihat dari kerjasama antara stakeholder yang terlibat tidak ada komunikasi yang baik antar stakeholder yang membuat kolaborasi multipihak tidak terjadi. Masing-masing stakeholder berdiri sendiri dalam menjalankan fungsinya, hal ini yang membuat tidak terpenuhi produksi jagung di Kabupaten Lima puluh Kota dan belum sejahteranya petani jagung di Kabupaten Lima puluh Kota

Berdasarkan data Simluhtan (2021) jumlah penyuluh pertanian pada BPP Guguk berjumlah 11 orang (lampiran 5) dengan 4 penyuluh PNS, 2 THL-TB PP, dan 5 penyuluh swadaya yang akan membina 120 kelompok tani (lampiran 6) yang terdiri dari 77 kelompok tani pemula, 32 kelompok tani lanjut, 9 kelompok tani madya, 0 kelompok tani utama, dan 2 kelompok tani belum diketahui. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa lebih dari separoh kelompok tani yang ada belum terjadi peningkatan kelas kelompok tani. Untuk itu diperlukan penyuluh dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dan kegiatan penyuluh yang memadai agar pembinaan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi positif kepada petani penerima manfaat. Pembinaan kelompok tani bertujuan agar terjadi perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari anggota kelompok tani yang pada akhirnya akan merubah tingkat kemampuan kelompok tani sebagai suatu organisasi

Berangkat dari permasalahan tersebut kolaborasi multipihak merupakan salah satu upaya yang sangat menentukan kesuksesan dan keberlanjutan dari kegiatan penyuluhan. Kolaborasi multipihak dalam kegiatan penyuluhan diharapkan mampu menjadi solusi alternatif untuk membantu petani dalam menguatkan di setiap rantai nilai. Mulai dari pra produksi, usahatani/produksi, pascapanen serta pemasaran (Djamaludin, 2017).

Dengan menguatkan rantai nilai bisa membantu untuk mengetahui pelaku yang ada dalam rantai nilai dan kemudian bisa dirumuskan strategi terbaik yang dapat

memberikan solusi bagi tiap pelaku. Sukayana (2013) menjelaskan bahwa dalam suatu kegiatan pertanian perlu diperhatikan rantai nilai dari sistem produksi mulai dari tanam sampai dengan perawatan, dilanjutkan setelah itu dalam hal sistem panen, kemudian dalam sistem pemasaran untuk melihat seberapa efektifkah rantai nilai dan bagaimana rantai nilai yang tercipta baru antar pelaku dalam rantai nilai. Irianto (2013) menemukan dalam rangkaian kegiatan rantai nilai tiap pelaku yang berperan di dalamnya akan mendapatkan keuntungan yang proporsional akan tetapi petani kurang mendapatkan hasil yang proporsional karena petani kurang mendapatkan informasi baik dari harga, sistem pemasaran, maupun dalam hal kualitas tanaman yang dihasilkan, apabila sudah tercipta suatu rangkaian kegiatan yang baik akan membentuk rantai nilai yang efisien, sehingga dapat membantu petani dalam meningkatkan penghasilan.

Permasalahan lainnya yang sedang dihadapi saat ini kerjasama dari ketiga penyuluh pun masih kurang terasa oleh petani jagung, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan kerjasama antara semua jenis penyuluh dan petani maupun pemerintah di bidang pertanian baik itu secara vertikal ataupun horizontal. Karna keberhasilan dari semua kegiatan dan program penyuluh sangat ditentukan oleh peranan yang dijalani dan kolaborasi yang terjadi antara multipihak dari berbagai pihak. Keterlibatan pemerintah dan penyuluh dalam kegiatan penyuluhan masih berupa pemberian bantuan dalam usaha tani belum dalam bagaimana petani dapat meningkatkan pendapatannya. Oleh sebab itu kolaborasi multipihak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis fokus pada lima stakeholders yaitu BP3K Kecamatan Guguak berperan sebagai pengambilan keputusan kebijakan, penyuluh berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program penyuluhan, petani berperan sebagai penerima manfaat dari kegiatan penyuluhan pertanian transformatif. Pedagang, sebagai penjual dari hasil produk pertanian, dan peternak sebagai konsumen dari hasil jagung. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian secara mendalam karna hasil dari kajian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan koordinasi yang lebih terbuka antar ketiga

stakeholder. Kolaborasi penyuluhan transformatif merupakan upaya yang sangat dibutuhkan guna menciptakan kegiatan penyuluhan pertanian yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Agar dapat mengatasi semua permasalahan dan kendala yang ada disepanjang aktifitas rantai nilai jagung dimulai dari praproduksi,produksi,pascapanen, dan pemasaran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan kolaborasi multipihak pada setiap aktifitas rantai nilai jagung saat ini?
2. Bagaimana bentuk kerjasama multipihak dan penyuluhan yang dibutuhkan pada setiap aktifitas rantai nilai jagung?

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Kolaborasi Multipihak dalam Kelembagaan Penyuluhan Pangan Transformatif Disepanjang Aktivitas Rantai Nilai. (Studi Kasus : Komoditi Jagung di Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota)”**

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan kolaborasi multipihak pada setiap aktifitas rantai nilai jagung saat ini (praproduksi-produksi-pascapanen-pemasaran).
- 2) Menganalisis bentuk kerjasama multipihak yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan jagung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang tertarik dengan pelaksanaan penyuluhan multipihak dalam usahatani pangan khususnya usahatani Jagung (*Zea mays L.*)

1. Bagi peneliti : Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana belajar dan memahami permasalahan yang menjadi topik penelitian
2. Bagi akademisi : Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Bagi stakeholder terkait : Penelitian ini dapat menjadi acuan keepannya untuk menjalankan kolaborasi multipihak dalam menjalankan kegiatan penyuluhan jagung yang lebih baik.

